

Prabowo Genggam Erat Tangan Try Sutrisno Saat Menjenguk

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjenguk Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno yang tengah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Kondisi Try Sutrisno kini dikabarkan membaik.

“Menjenguk Wakil Presiden RI ke 6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di RSPAD,” kata Prabowo dalam akun Instagram resminya, @prabowo, Rabu (21/12).

Dalam foto yang diunggah Prabowo tersebut, Prabowo menggenggam erat tangan Try Sutrisno yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Prabowo dan Try Sutrisno terlihat bertatap muka.

Sebelumnya, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Letnan Jenderal TNI dr Albertus Budi Sulistya,

mengungkapkan kondisi Try Sutrisno sudah membaik saat ini.

“Kesehatan beliau saat ini sudah pulih sesuai usia,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (18/12).

Budi mengungkapkan bahwa mantan Panglima ABRI itu juga akan segera diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, Budi tidak menjelaskan kapan tepatnya Try Sutrisno diperbolehkan pulang.

“Betul (segera diperbolehkan pulang),” katanya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh menjenguk Try Sutrisno ke RSPAD. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, termasuk tokoh yang berkesempatan mengecek kondisi Try Sutrisno. ● han

NasDem Sebut Ada Tempat Spesial untuk Andika Perkasa

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, partainya membuka pintu untuk bergabungnya Jenderal Andika Perkasa usai purna tugas sebagai Panglima TNI.

Willy mengatakan, Andika memiliki tempat spesial di partai besutan Surya Paloh itu.

“Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka,” kata Willy saat dihubungi, Selasa (20/12).

Menurut Willy, partainya akan menindaklanjuti kesempatan tersebut. Caranya, dengan mengajak berkomunikasi Andika membahas politik pada awal tahun depan. “Habisi inilah, mungkin ya habis tahun baru lah nanti bagaimana obrol dengan Pak Andika,” ucap Willy.

“Ya salaturrahmi,” katanya.

Namun demikian, Willy tak menjelaskan ketika ditanya kemungkinan pertemuan NasDem dengan Andika itu terkait pencalonan presiden untuk Pemilu 2024. Diketahui, NasDem mencantumkan Andika sebagai satu dari tiga bakal capres berdasarkan hasil Rakernas 2022.

Ketika itu, NasDem mengumumkan bakal capresnya yaitu mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa.

Sebagai informasi, Jenderal Andika Perkasa telah resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono, Selasa (20/12/2022). Kendati sudah tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Andika masih seorang perwira tinggi TNI aktif hingga akhir Desember 2022. ● han

TNI AL Ajak Latihan 48 Negara, Korut dan Korsel Ikut Gabung

JAKARTA (IM) - TNI AL mengajak 48 negara untuk latihan bersama bertajuk 4th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK). Adapun latihan bersama ini akan diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Juni 2023.

Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Armada II, Laksamana Pertama Denny Prasetyo mengatakan, TNI AL bersama ke-48 negara itu, saat ini sedang membahas rencana latihan tersebut.

“Pada dasarnya ini merupakan proses untuk perencanaan, khususnya perencanaan untuk pelaksanaan pelatihan bersama negara-negara sahabat,” ujar Denny di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Denny mengatakan, latihan itu bertema penganggulangan bencana atau “humanitarian assistant for disaster relief”.

“Karena sebenarnya MNEK ini adalah kegiatan yang bersifat non war fighting exercise. Jadi khusus kami acaranya atau rencanakan untuk kegiatan yang bersifat bantuan kemanusiaan atau bantuan terhadap bencana alam. Itu even yang akan kami maksimalkan pada saat nanti di Makassar nanti,” kata Denny.

Dalam hal ini, TNI AL mengundang 48 negara, dua di antaranya Korea Utara dan Korea Selatan.

“Mereka kami ajak bersama ya mereka baik-baik saja,” ujar Denny.

Dalam latihan bersama nanti, TNI AL mengerahkan 17 kapal berbagai tipe.

“Itu ada 17 berbagai tipe kapal, terutama Kapal Rumah Sakit yang baru saja diresmikan mungkin akan dilibatkan yaitu KRI Wahidin Sudirohusodo,” ucap Denny. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



LATIHAN INTERNASIONAL ANGKATAN LAUT MNEK 2023

Danguspurla Koarmada II (Laksa TNI Deny Prasetyo (tengah depan) berfoto bersama dengan sejumlah delegasi saat pertemuan ‘Initial Planning Conference (IPC)’ di Jakarta, Rabu (21/12). IPC merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan latihan angkatan laut internasional ‘4th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023’ bertemakan ‘Partnership to Recover and to Rise Stronger’ yang diikuti sekitar 47 negara dan rencananya akan berlangsung pada Juni 2023 mendatang.

Luhut Bilang OTT Tidak Bagus untuk Indonesia, KPK: Jangan Disalahartikan

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bukan hanya terfokus pada penindakan atau OTT. Tapi juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

JAKARTA (IM) - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak baik untuk Bangsa Indonesia, menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Banyak pihak yang tidak

sepatuk dengan pernyataan Luhut. Namun, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak justru menyambut baik pernyataan Luhut itu.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan pernyataan dan usulan Luhut terkait OTT KPK. Sebab yang perlu ditekankan dari pernyataan Luhut sebenarnya adalah soal

penerapan digitalisasi.

“Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi,” kata Johanis kepada wartawan, Rabu (21/12).

Ia mengaku memahami apa yang dimaksud Luhut soal KPK jangan sering-sering melakukan tangkap tangan. Menurut Johanis, maksud Luhut tersebut agar ada penguatan sistem pencegahan

korupsi ketimbang harus melakukan upaya penindakan berupa penangkapan.

“Jadi jangan disalahartikan maksud beliau, dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan tangkap tangan (TTT/T3). Kalau banyak yang kena T3, berarti birokrasi masih belum bagus, untuk itu beliau mengharapkan dengan menggunakan digitalisasi pada birokrasi, maka diharapkan tidak ada lagi T3,” bebernya.

Tak Hanya Dipidanakan

Sementara menurut Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, dalam memberantas korupsi yang dilakukan KPK bukan hanya terfokus pada penindakan atau OTT terhadap penyelenggara negara saja. Tapi kerja KPK dilakukan secara holistik yakni berupa pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja, tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik,” kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (21/12).

Ali mencontohkan, KPK pernah beberapa kali menangkap kepala daerah karena

menerima suap terkait modus perizinan, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, maupun pengelolaan anggaran. Penangkapan itu, kata Ali, juga dibarengi dengan pendampingan dan pengawasan terhadap kepala daerah.

Sebelumnya, Luhut mengkritisi upaya penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Menurut Luhut, OTT tidak bagus untuk bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ia mengusulkan agar ada optimalisasi digitalisasi dalam birokrasi di setiap lembaga serta instansi pemerintah.

“Bukan jelek, ya jelek buat kita dong karena kita bikin peluang ada OTT, kalau semua udah digitalize kan enggak mungkin lagi ada OTT, bagus kan. OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita,” kata Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

“Jadi KPK pun jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan menurut saya enggak akan bisa main,” ungkapnya. ● han

Usut Suap Hakim Agung, KPK Periksa Pengacara hingga Pengusaha

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat lima hakim di MA. Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk tiga saksi yang diperiksa pada Rabu (21/12).

Ketiga saksi tersebut yakni Pengacara Ahmad Riyadh, Pegawai MA Bernama Rizki Andayani, serta seorang pengusaha Bernama Timothy Ivan Tri Yono. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Para peserta aksi akan berkecambah dan membawa payung hitam bertuliskan: #SAHKAN RUU PPRT selama menyampaikan aspirasi mereka dalam berbagai bentuk ekspresi. ● mei

Hari Ibu, Jokowi dan Puan Didesak Agar Bersuaralah Dukung Pengesahan UU PRT

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR Puan Maharani, didesak agar bersuara mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Sebab, sudah banyak Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang berjatuh.

“Mendesak Presiden dan Ketua DPR bersuara mendukung pengesahan UU PPRT demi menghentikan kekerasan dan praktek perbudakan modern terhadap ibu-ibu Pekerja Rumah Tangga (PRT),” tulis Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan PRT seperti dikutip dalam siaran persnya, Rabu (21/22).

Dalam keterangan persnya, disebutkan para Ibu PRT berjatuh menjadi korban dari semua bentuk kekerasan, ini seperti deret ukur saja. Luka dan trauma sering di luar batas kemanusiaan, bahkan mereka diperlakukan sebagai budak. Poniah, Anik, Rizki, Rumiya, atau Khotimah mewakili ribuan korban yang masih tersembunyi di balik tembok dan gembok para majikan atau pemberi kerja.

Para Ibu PRT tersebut sudah pasti dari kelompok keluarga miskin dan papa. Mereka kaum yang disisihkan masyarakat dan Negara.

Sementara para pelakunya bisa siapa saja. Mulai keluarga biasa, hingga keluarga kaya raya, terpelajar, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Yang pasti, adanya kekosongan hukum membuka ruang tidak kesewenangan yang membuat para ibu-ibu PRT menderita sepanjang hidup mereka.

Sudah sejak 19 tahun lalu RUU PPRT diperjuangkan di DPR RI, dan telah 2,5 tahun tertahan di meja Pimpinan DPR agar menjadi RUU Inisiatif DPR.

Para ibu PRT di Indonesia ini melakukan aksi di 8 kota di Indonesia dan meminta perhatian Presiden Jokowi dan Ketua DPR, Puan Maharani agar para PRT tidak dipandang rendah, sebelah mata, diakui keberadaannya sebagai pekerja dan manusia.

Para ibu meminta pada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani untuk menghentikan kekerasan, diskriminasi yang selama ini terjadi pada PRT.

PRT adalah pekerja yang bekerja di balik tembok. Kekerasan yang terjadi pada PRT tersembunyi di antara tembok yang tidak terlihat.

Hingga hari ini, Peme-

rintah dan DPR masih abai pada kenyataan-kenyataan yang menyakitkan bagi mereka. Desember 2022 merupakan titik nadir RUU PPRT. Presiden dan Ketua DPR masih bergeming dengan isu ini.

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan PRT menggelar aksi serentak di 8 kota pada hari ini, Rabu (21/12). Aksi payung duka seribu ibu-ibu PRT di Indonesia itu digelar Pukul. 10.00 WIB.

1. Jakarta: Pangung Aspirasi Seberang Istana Negara.
2. Kota Malang: Taman Aspirasi Seberang Kantor DPRD dan Audiensi DPRD Kota Malang.
3. Surabaya: Gedung DPRD Kota Surabaya.
4. Tangerang: Audiensi ke FPDIP DPRD Kota Tangsel.
5. DIY: Orasi dan Audiensi ke DPRD DIY.
6. Semarang: Gedung DPRD Prov Jateng.
7. Medan: Gedung DPRD Prov Sulut.
8. Makassar: Gedung DPRD Prov Sulsel.

Para peserta aksi akan berkecambah dan membawa payung hitam bertuliskan: #SAHKAN RUU PPRT selama menyampaikan aspirasi mereka dalam berbagai bentuk ekspresi. ● mei

FOTO: ANT



AKSI PEKERJA RUMAH TANGGA

Korban kekerasan pekerja rumah tangga, Sri Siti Marni (28) mengikuti aksi Rabuan PRT: Payung Duka Seribu Ibu-ibu PRT Indonesia di Taman Aspirasi Monas, Jakarta, Rabu (21/12). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Presiden dan Ketua DPR bersuara untuk mendukung pengesahan UU PPRT guna menghentikan kekerasan dan praktek perbudakan modern terhadap ibu-ibu pekerja rumah tangga.

mandiri

PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada tanggal 21 Desember 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Debitur Tjandra
- Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp. 596.711,372.00
- Cessionair a.n. **Handi Kurniawan** yang bertempat tinggal di Jl. Jati Baru Bundar No. 4 RT. 003 RW. 009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt. 21 Desember 2022 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Tjandra telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT Bank Mandiri (Persero),Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 (“SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39”).

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39, telah sepakat untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 tertanggal 21 Desember 2022.
- Bahwa seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 telah jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga pada tanggal ditandatangani Kesepakatan Pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dalam SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39.
- Pada tanggal 22 Desember 2022, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 sejak tanggal 22 Desember 2022.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA
Jakarta, 22 Desember 2022
Manajer Investasi
Manajer Investasi
Manajer Investasi selaku Likuidator SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND 39
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan